Cegah Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa, Seluruh Kepala OPD Tandatangan Komitmen Bersama

Rabu, 29 Januari 2020

Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pasuruan menandatangani komitmen bersama untuk mencegah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Penandatanganan ini dilakukan di sela-sela acara Pendampingan permasalahan pengadaan barang/jasa pemerintah, dihadiri oleh Bupati Pasuruan, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan Direktur penanganan permasalahan hukum LKPP.

Komitmen bersama ini berisi sembilan poin penting yang harus dijalankan oleh seluruh Kepala OPD dan stafnya. Poin-poin tersebut meliputi penerapan prinsip-prinsip pengadaan yang transparan, efisien, dan akuntabel, pelaksanaan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga kerahasiaan informasi, menghindari persaingan usaha tidak sehat, dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara.

Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf, menegaskan pentingnya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawasi proses pengadaan barang dan jasa. Irsyad menekankan bahwa proses pengadaan harus diawasi sejak tahap perencanaan hingga serah terima pekerjaan untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan aturan dan bebas dari penyimpangan.

Irsyad juga mengakui pentingnya dukungan penegakan hukum dalam pelaksanaan praktik pengadaan barang/jasa, serta menekankan pentingnya koordinasi dengan aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Pemkab Pasuruan telah menandatangani perjanjian kerja sama tentang koordinasi APIP dengan APH untuk penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan.

Komitmen bersama ini diharapkan dapat menciptakan rasa aman dan nyaman dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga dapat terhindar dari berbagai permasalahan dan penyimpangan.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.